Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Membaca Kembali Sejarah Perempuan dalam Politik Madura Abad XVIII:Raden Ayu Tirtonegoro dalam Historiografi Sumenep

Zainatul Jannah
UIN Sunan Ampel Surabaya
zainatuljannah043@gmail.com

Abstrak: Historiografi politik Madura abad XVIII cenderung menempatkan tokoh laki-laki sebagai aktor utama dalam narasi kekuasaan, sementara keterlibatan perempuan dalam dinamika politik lokal belum banyak dikaji secara khusus. Kondisi tersebut terlihat dalam penulisan sejarah Sumenep yang lebih sering menempatkan perempuan dalam konteks genealogis dan hubungan kekerabatan dengan penguasa. Penelitian ini bertujuan untuk membaca kembali posisi Raden Ayu Tirtonegoro dalam historiografi Sumenep serta mengidentifikasi bentuk keterlibatan dan agensinya dalam politik Madura abad XVIII. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan pendekatan sejarah perempuan dan historiografi. Sumber penelitian mencakup historiografi lokal, silsilah keluarga keraton, serta sumber kolonial yang memberikan informasi mengenai lingkungan politik Sumenep pada abad XVIII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembacaan terhadap berbagai sumber memungkinkan posisi Raden Ayu Tirtonegoro dipahami tidak semata-mata sebagai tokoh genealogis atau pendamping penguasa, tetapi sebagai bagian dari dinamika politik dan legitimasi kekuasaan di Sumenep. Pembacaan melalui perspektif sejarah perempuan juga memperlihatkan pentingnya menempatkan pengalaman dan agensi perempuan dalam rekonstruksi sejarah politik Madura.

Kata Kunci: historiografi, Madura, politik, perempuan, Sumenep

PENDAHULUAN

Penulisan sejarah politik tidak hanya berkaitan dengan peristiwa, pergantian penguasa, dan perubahan struktur pemerintahan, tetapi juga dengan cara tokoh-tokoh sejarah ditempatkan dalam narasi mengenai masa lalu. Pemilihan tokoh, penekanan terhadap peristiwa tertentu, serta cara penulis menjelaskan hubungan antarpelaku turut memengaruhi gambaran sejarah yang dihasilkan. Persoalan ini menjadi penting dalam kajian sejarah perempuan karena keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik tidak selalu memperoleh perhatian yang sebanding dengan peran laki-laki. Historiografi yang berpusat pada tokoh laki-laki berpotensi menempatkan perempuan hanya sebagai bagian dari hubungan perkawinan, garis keturunan, atau pendamping penguasa, sementara keterlibatan mereka dalam dinamika kekuasaan belum tentu dijelaskan secara memadai. Oleh karena itu, pembacaan sejarah perempuan perlu dilakukan bukan hanya dengan menghadirkan kembali nama tokoh yang kurang mendapat perhatian, tetapi juga dengan

mempertanyakan bagaimana posisi, keterlibatan, dan agensinya dibentuk dalam penulisan sejarah (Amini, 2018: 155; Pradadimara, 2019: 69).

Persoalan tersebut relevan untuk mengkaji sejarah politik Madura pada abad XVIII, khususnya pemerintahan Sumenep. Dinamika politik Sumenep pada periode ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan hubungan antara penguasa lokal dan kekuatan politik yang lebih luas. Hubungan Sumenep dengan VOC telah berkembang sebelum pertengahan abad XVIII, antara lain melalui perjanjian pada 5 Oktober 1705 yang menjadi bagian penting dalam perubahan kedudukan politik Sumenep. Perkembangan tersebut memberikan konteks bagi pemahaman mengenai lingkungan politik yang melatarbelakangi pemerintahan Sumenep pada periode berikutnya. Akan tetapi, kajian mengenai hubungan politik Sumenep dengan VOC pada 1624–1705 memiliki rentang waktu yang berbeda dari periode pemerintahan Raden Ayu Tirtonegoro. Oleh sebab itu, dinamika politik Sumenep pada pertengahan abad XVIII perlu dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemerintahan, termasuk perempuan yang berada dalam lingkungan kekuasaan (Rahayu, 2016).

Raden Ayu Tirtonegoro merupakan tokoh perempuan yang berkaitan dengan pemerintahan Sumenep pada pertengahan abad XVIII. Periode 1750–1762 M menjadi rentang waktu penting untuk menelaah kedudukannya dalam dinamika politik lokal, termasuk hubungannya dengan Bindara Saod dan persoalan keberlanjutan pemerintahan. Namun, keberadaan seorang perempuan dalam lingkungan penguasa tidak dengan sendirinya menjelaskan bentuk keterlibatan politik yang dijalankannya. Hubungan perkawinan, garis keturunan, dan kedudukan dalam keluarga penguasa merupakan informasi yang penting, tetapi perlu dibedakan dari bukti mengenai peran dalam pengambilan keputusan, pengelolaan pemerintahan, atau pembentukan legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Raden Ayu Tirtonegoro perlu dilakukan dengan memeriksa informasi yang benar-benar disampaikan oleh sumber sejarah serta mempertimbangkan batas-batas informasi tersebut. Langkah ini diperlukan agar pembacaan mengenai agensi perempuan tidak hanya didasarkan pada dugaan, tetapi bertumpu pada keterangan yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Hubungan antara perempuan dan kekuasaan dalam masyarakat Madura juga telah menjadi perhatian penelitian terdahulu. Kepemimpinan perempuan dapat dipengaruhi oleh konstruksi budaya, hubungan kekerabatan, dan kondisi sosial yang melingkupinya. Kajian mengenai “kalebun bebini’”, misalnya, membahas kepemimpinan perempuan

dalam pemerintahan desa di Madura serta hubungan antara konstruksi budaya dan upaya mempertahankan kekuasaan. Meskipun memberikan konteks mengenai relasi perempuan dan kekuasaan di Madura, penelitian tersebut berfokus pada kepemimpinan desa yang berbeda dari pemerintahan kerajaan Sumenep pada abad XVIII. Temuannya karena itu tidak dapat langsung digunakan untuk menjelaskan kedudukan Raden Ayu Tirtonegoro. Relevansinya terletak pada pentingnya memperhatikan relasi gender, kekerabatan, dan konteks sosial ketika menganalisis posisi perempuan dalam lingkungan kekuasaan (Hidayati, 2014: 203-204).

Pembacaan terhadap posisi Raden Ayu Tirtonegoro juga memerlukan perhatian terhadap karakter dan keterbatasan sumber sejarah. Setiap sumber memiliki latar belakang penyusunan, tujuan, serta sudut pandang yang dapat memengaruhi informasi yang disampaikan. Dokumen kolonial, misalnya, dapat memberikan keterangan mengenai hubungan resmi dan kedudukan politik penguasa lokal, tetapi belum tentu menjelaskan seluruh dinamika pemerintahan di lingkungan keraton. Sebaliknya, historiografi lokal dapat memuat narasi mengenai hubungan kekerabatan, konflik antarelite, dan pergantian penguasa, tetapi narasi tersebut tetap perlu diperiksa berdasarkan konteks penyusunannya. Oleh sebab itu, sumber sejarah tidak cukup dibaca sebagai kumpulan informasi yang berdiri sendiri. Keterangan di dalamnya perlu diuji dan dibandingkan dengan sumber lain agar peneliti dapat membedakan informasi yang memiliki dukungan silang, keterangan yang hanya ditemukan dalam satu sumber, dan persoalan yang belum dapat dijelaskan secara memadai. Kritik sumber menjadi bagian penting dalam proses tersebut, terutama ketika sumber yang digunakan tidak disusun secara langsung pada masa peristiwa yang diteliti (Abdurrahman, 1999).

Salah satu sumber yang relevan untuk menelusuri narasi mengenai Raden Ayu Tirtonegoro adalah “Babad Sumenep”. Sebagai bagian dari historiografi lokal, babad dapat memberikan informasi mengenai tokoh, peristiwa, dan hubungan antarpelaku dalam tradisi penulisan sejarah Sumenep. Akan tetapi, narasi di dalamnya tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai catatan langsung yang sepenuhnya merekam keadaan pada abad XVIII. Waktu penyusunan, latar belakang penulis, tujuan penulisan, dan bentuk narasi perlu dipertimbangkan sebelum informasi di dalamnya digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Dengan demikian, “Babad Sumenep” dalam penelitian ini dibaca secara kritis dan dibandingkan dengan sumber lain yang relevan, seperti silsilah keluarga keraton dan dokumen kolonial. Perbandingan tersebut bukan

semata-mata untuk menentukan sumber mana yang paling benar, melainkan untuk memahami jenis informasi yang disampaikan setiap sumber, kemungkinan perbedaan sudut pandang, serta cara kedudukan Raden Ayu Tirtonegoro ditampilkan dalam narasi sejarah. Pendekatan ini juga menghindari anggapan bahwa keterbatasan informasi dalam suatu sumber dengan sendirinya membuktikan tidak adanya keterlibatan politik perempuan pada masa tersebut.

Penelitian terdahulu yang ditelaah memberikan landasan untuk memahami bias gender dalam historiografi, perkembangan penulisan sejarah perempuan, perubahan hubungan politik Sumenep dengan VOC, serta relasi perempuan dan kekuasaan dalam masyarakat Madura. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus dan konteks yang berbeda. Kajian mengenai bias gender membahas persoalan historiografi perempuan secara lebih luas, sedangkan penelitian mengenai hubungan politik Sumenep dengan VOC berfokus pada periode sebelum pemerintahan Raden Ayu Tirtonegoro. Sementara itu, kajian mengenai kepemimpinan perempuan di Madura berangkat dari konteks pemerintahan desa yang berbeda dari lingkungan kerajaan pada abad XVIII (Amini, 2018: 157–158; Pradadimara, 2019: 69–85; Rahayu, 2016; Hidayati, 2014: 203-204). Berdasarkan perbedaan tersebut, artikel ini memusatkan perhatian pada pembacaan posisi Raden Ayu Tirtonegoro dalam historiografi Sumenep dengan menghubungkan persoalan keterlibatan perempuan dalam dinamika politik dan cara sumber sejarah merepresentasikan dirinya. Kebaruan yang ditawarkan terletak pada fokus analisis tersebut, bukan pada klaim bahwa Raden Ayu Tirtonegoro belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, artikel ini berupaya memperluas pembahasan sejarah politik Madura melalui perhatian terhadap representasi dan agensi perempuan dalam rekonstruksi sejarah lokal.

Penelitian ini bertujuan membaca kembali posisi Raden Ayu Tirtonegoro dalam historiografi Sumenep serta mengidentifikasi bentuk keterlibatan dan agensinya dalam politik Madura abad XVIII berdasarkan informasi yang dapat ditelusuri dari sumber sejarah. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik dilakukan melalui penelusuran historiografi lokal, silsilah keluarga keraton, dokumen kolonial, serta penelitian terdahulu yang relevan. Kritik sumber digunakan untuk memeriksa asal-usul, konteks, dan kredibilitas informasi. Selanjutnya, interpretasi dilakukan dengan membandingkan keterangan antarsumber dan menganalisis representasi Raden Ayu Tirtonegoro dalam konteks politik

Sumenep. Hasil analisis kemudian disusun melalui tahap historiografi secara kritis dan sistematis. Tahapan tersebut mengikuti prinsip metode penelitian sejarah yang menempatkan penelusuran sumber, kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah sebagai proses yang saling berkaitan (Abdurrahman, 1999). Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah perempuan dan historiografi untuk memperhatikan posisi perempuan dalam narasi sejarah serta mengkaji bagaimana sumber sejarah menggambarkan keterlibatan dan agensinya. Melalui pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah perempuan dan historiografi lokal, khususnya dalam memahami posisi Raden Ayu Tirtonegoro dalam sejarah politik Madura abad XVIII. Abdurrahman, D. (1999). "Metode penelitian sejarah". Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Historiografi Perempuan dan Penulisan Sejarah Politik Madura

Penulisan sejarah politik selama ini tidak hanya berkaitan dengan peristiwa dan tokoh yang dipilih untuk dibahas, tetapi juga dengan cara sejarawan menentukan siapa yang dianggap sebagai pelaku utama dalam sejarah. Dalam banyak karya historiografi Indonesia, tokoh laki-laki lebih sering ditempatkan sebagai penggerak utama perubahan politik, sedangkan perempuan cenderung muncul dalam pembahasan mengenai keluarga, perkawinan, keturunan, atau kehidupan domestik. Kecenderungan ini tidak berarti bahwa perempuan tidak terlibat dalam kehidupan politik masa lalu, melainkan menunjukkan bahwa pengalaman dan tindakan politik mereka belum selalu mendapatkan perhatian yang seimbang dalam penulisan sejarah. Mutiah Amini menjelaskan bahwa bias gender dalam historiografi Indonesia berkaitan dengan kuatnya dominasi narasi maskulin yang kemudian diwariskan melalui tradisi penulisan sejarah. Oleh karena itu, pembacaan kembali sejarah perempuan perlu dilakukan dengan mengkritisi bukan hanya informasi yang tersedia, tetapi juga cara informasi tersebut dipilih dan disusun menjadi narasi sejarah (Amini, 2018, hlm. 157–160).

Persoalan tersebut juga menjadi perhatian Dias Pradadimara dalam kajiannya mengenai perempuan dan perspektif gender dalam penulisan sejarah Indonesia. Pradadimara membedakan kecenderungan penulisan sejarah perempuan yang bersifat deskriptif dan kausal. Penulisan deskriptif umumnya menonjolkan tokoh perempuan, organisasi, atau gerakan perempuan, sedangkan penulisan kausal berusaha menjelaskan

bagaimana kategori gender berhubungan dengan pembentukan hierarki dan relasi kekuasaan. Perbedaan ini penting bagi penelitian tentang Raden Ayu Tirtonegoro karena keberadaan seorang perempuan sebagai penguasa tidak cukup hanya dicatat sebagai fakta bahwa perempuan pernah menduduki jabatan politik. Penelitian juga perlu mempertanyakan bagaimana kedudukan tersebut terbentuk, bagaimana ia ditempatkan dalam struktur sosial dan politik, serta bagaimana penulisan sejarah kemudian menjelaskan perannya. Dengan demikian, pembahasan Tirtonegoro tidak berhenti pada penambahan tokoh perempuan ke dalam daftar penguasa Sumenep, tetapi diarahkan untuk memahami persoalan representasi dan agensi perempuan dalam sejarah politik lokal (Pradadimara, 2019, hlm. 69–76).

Dalam konteks Madura, kajian mengenai perempuan dan politik memperlihatkan bahwa hubungan kekerabatan, konstruksi budaya, serta otoritas sosial menjadi unsur penting dalam memahami posisi perempuan. Tatik Hidayati, melalui kajiannya tentang "kalebun bebini'", menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di tingkat lokal dapat berkaitan dengan mekanisme pewarisan kekuasaan keluarga. Akan tetapi, keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan tidak selalu dapat dijelaskan dengan satu pola yang sama. Perempuan dapat menjadi bagian dari keberlanjutan kekuasaan keluarga, tetapi analisis tetap perlu memperhatikan posisi, kepentingan, dan ruang tindakan perempuan itu sendiri. Kajian tersebut relevan sebagai kerangka pembanding untuk memahami politik perempuan di Madura, meskipun konteks kepala desa pada masa kontemporer tidak dapat disamakan secara langsung dengan pemerintahan Sumenep pada abad XVIII (Hidayati, 2014, hlm. 203-204).

Persoalan serupa dibahas Abd. Warits dalam penelitian mengenai hambatan kultural dan tafsir agama terhadap partisipasi politik perempuan di Sumenep. Penelitiannya memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik tidak dapat dilepaskan dari nilai sosial dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, Rahmawati, Susanti, dan Suyanto menelaah posisi perempuan "kalebun" dalam konstelasi kekuasaan patriarkal di Madura. Kajian tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan hubungan antara kepemimpinan perempuan, kepentingan kekerabatan, dan struktur kekuasaan yang lebih luas. Kedua penelitian ini memberikan perspektif untuk memahami bahwa kehadiran perempuan dalam ruang politik tidak secara otomatis menghilangkan ketimpangan gender. Namun, karena penelitian Warits dan Rahmawati dkk. Berfokus pada konteks yang lebih modern, hasilnya digunakan sebagai

bahan perbandingan konseptual, bukan sebagai bukti langsung mengenai keadaan sosial Sumenep pada abad XVIII (Warits, 2012, hlm. 183–199; Rahmawati et al., 2021, hlm. 87–99).

Perspektif sejarah perempuan juga dapat diperluas melalui penelitian Peter Carey dan Vincent Houben mengenai peran sosial, politik, dan ekonomi perempuan di lingkungan keraton Jawa Tengah pada abad XVIII dan awal abad XIX. Kajian tersebut penting karena memperlihatkan bahwa perempuan di lingkungan elite kerajaan perlu dipahami dalam kaitannya dengan struktur sosial dan politik tempat mereka berada. Meskipun lingkungan keraton Jawa Tengah tidak identik dengan Sumenep, penelitian tersebut memberikan landasan perbandingan bahwa kehidupan perempuan elite tidak seharusnya dipisahkan secara mutlak dari persoalan kekuasaan. Dalam penelitian mengenai Tirtonegoro, perspektif ini membantu mengarahkan perhatian pada hubungan antara kedudukan perempuan, jaringan keluarga, dan struktur pemerintahan, tanpa terlebih dahulu menganggap bahwa perempuan hanya berperan sebagai pendamping penguasa laki-laki (Carey & Houben, 1987, hlm. 12–42).

Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa sejarah perempuan dapat dikembangkan melalui lebih dari sekadar penelusuran biografi tokoh. Penelitian juga dapat mengkaji bagaimana relasi gender membentuk akses terhadap kekuasaan, bagaimana perempuan direpresentasikan dalam sumber sejarah, serta bagaimana narasi mengenai mereka diwariskan melalui historiografi. Dalam konteks ini, Raden Ayu Tirtonegoro menjadi kasus yang penting untuk dikaji karena namanya tetap dikenal dalam sejarah Sumenep, tetapi penjelasan mengenai dirinya sering berkaitan dengan garis keturunan, perkawinan, dan hubungan dengan Bindara Saod. Persoalan yang perlu diperiksa bukan semata-mata apakah Tirtonegoro pernah menduduki posisi pemerintahan, melainkan bagaimana penulisan sejarah menjelaskan kedudukannya dan sejauh mana penjelasan tersebut memberikan ruang bagi dirinya sebagai pelaku politik.

Dengan demikian, artikel ini mengambil posisi berbeda dari penelitian yang berfokus pada kronologi pemerintahan Tirtonegoro. Pembahasan diarahkan pada hubungan antara historiografi perempuan, struktur kekuasaan lokal, dan pembentukan ingatan sejarah mengenai Tirtonegoro. Penelitian terdahulu tentang perempuan Madura digunakan untuk membangun kerangka analisis, sedangkan sumber lokal dan dokumen kolonial digunakan untuk menguji serta memperkaya pembacaan terhadap kasus Sumenep. Pendekatan tersebut memungkinkan Tirtonegoro dibahas bukan hanya sebagai

tokoh perempuan yang pernah memimpin, tetapi juga sebagai persoalan historiografis yang memperlihatkan hubungan antara gender, legitimasi, dan penulisan sejarah politik.

Raden Ayu Tirtonegoro dalam Historiografi Sumenep

Raden Ayu Tirtonegoro merupakan salah satu tokoh perempuan yang menempati posisi penting dalam ingatan sejarah Sumenep. Dalam profil sejarah yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sumenep, ia disebut sebagai pemimpin perempuan dan kepala pemerintahan Sumenep ke-30. Narasi tersebut menghubungkan dirinya dengan Bindara Saod, perkawinan keduanya, pemberian gelar Tumenggung Tirtonegoro kepada Bindara Saod, serta konflik yang melibatkan Patih Purwonegoro. Narasi resmi ini menunjukkan bahwa Tirtonegoro tetap hadir dalam pengetahuan sejarah yang disampaikan kepada masyarakat. Namun, cara penyajiannya juga memperlihatkan bahwa kisah perkawinan dan konflik di lingkungan keraton menjadi bagian penting dalam penjelasan mengenai dirinya (Pemerintah Kabupaten Sumenep, 2017).

Kisah tersebut perlu dibaca secara kritis karena narasi tentang seorang penguasa tidak hanya menyampaikan informasi mengenai masa lalu, tetapi juga membentuk cara pembaca memahami kedudukannya. Ketika seorang perempuan diperkenalkan melalui perkawinan, hubungan keluarga, atau konflik personal, perhatian pembaca dapat lebih terarah pada kehidupan pribadinya daripada pada kedudukannya dalam pemerintahan. Meskipun unsur-unsur tersebut tetap penting dalam sejarah kerajaan, penggunaannya sebagai kerangka utama narasi berpotensi membuat dimensi politik perempuan kurang terlihat. Dalam kasus Tirtonegoro, penyebutan dirinya sebagai kepala pemerintahan justru memberikan dasar untuk mengembangkan pertanyaan yang lebih luas mengenai bagaimana kedudukan tersebut dipahami dan dijelaskan dalam historiografi Sumenep.

Kecenderungan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks penulisan sejarah lokal. Historiografi lokal memiliki peran penting dalam mempertahankan ingatan kolektif mengenai asal-usul masyarakat, pergantian penguasa, hubungan kekerabatan, dan kesinambungan pemerintahan. Zainollah Ahmad melalui "Babad Modern Sumenep: Sebuah Telaah Historiografi" menempatkan sejarah Sumenep dalam pembahasan yang luas mengenai perkembangan politik dan budaya daerah. Karya tersebut relevan bagi penelitian ini sebagai salah satu rujukan untuk memahami bagaimana sejarah Sumenep disusun dan diwariskan dalam historiografi modern. Akan tetapi, penilaian yang lebih terperinci mengenai posisi Tirtonegoro dalam karya tersebut tetap perlu didasarkan pada

bagian teks yang secara langsung membahas dirinya, bukan semata-mata pada gambaran umum mengenai cakupan buku (Ahmad, 2018).

Dalam konteks ini, “Babad Sumenep” atau “Babad Songennep” digunakan sebagai sumber pelengkap untuk melihat bentuk narasi lokal mengenai Tirtonegoro. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap salinan babad yang digunakan dalam penelitian, cerita yang berkaitan dengan dirinya mencakup perkawinan dengan Bindara Saod, konflik yang melibatkan Patih Purwonegoro, dan persoalan penerus pemerintahan. Unsur-unsur tersebut memperlihatkan bahwa ingatan mengenai Tirtonegoro diwariskan melalui cerita yang menghubungkan kehidupan keluarga kerajaan dengan pergantian dan keberlanjutan kekuasaan. Akan tetapi, babad tersebut tidak memberikan uraian yang cukup terperinci untuk menjelaskan seluruh mekanisme pemerintahan atau pembagian kewenangan politik pada masa Tirtonegoro. Oleh karena itu, isi babad perlu ditempatkan sesuai dengan karakter dan batas informasi yang benar-benar disediakannya Babad Songennep, edisi atau salinan yang digunakan penulis, hlm. [Babad Sumenep 344-347).

Penggunaan babad dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan seluruh ceritanya sebagai fakta sejarah yang berdiri sendiri. Sebaliknya, babad dibaca sebagai bagian dari historiografi lokal yang dapat memperlihatkan bagaimana suatu tokoh diingat, peristiwa tertentu dipilih untuk diceritakan, dan hubungan antara keluarga dengan pemerintahan dijelaskan. Pembacaan ini penting karena teks sejarah lokal dapat menyimpan informasi mengenai tradisi politik dan ingatan masyarakat, tetapi juga memiliki keterbatasan yang perlu diperiksa melalui kritik sumber. Dengan demikian, babad berfungsi untuk memperkaya pembahasan tentang representasi Tirtonegoro, sementara penjelasan mengenai lingkungan politiknya perlu dibandingkan dengan sumber lain.

Pembacaan terhadap historiografi Sumenep dengan demikian menunjukkan adanya perbedaan antara pengakuan atas kedudukan Tirtonegoro dan penjelasan mengenai peran politiknya. Ia dapat dikenang sebagai pemimpin perempuan, tetapi kisah yang diwariskan mengenai dirinya tidak selalu menjelaskan secara terperinci bagaimana kedudukannya dijalankan. Perbedaan ini menjadi titik berangkat penting untuk mengembangkan sejarah perempuan: bukan dengan menolak narasi lokal, melainkan dengan mengajukan pertanyaan baru terhadap informasi yang sudah diwariskan. Pertanyaan tersebut mencakup bagaimana kedudukan Tirtonegoro dijelaskan, mengapa

unsur tertentu lebih menonjol daripada unsur lainnya, serta bagaimana keterbatasan narasi yang tersedia dapat diatasi melalui perbandingan sumber.

Jejak Dokumenter dan Konteks Politik Sumanap

Selain historiografi lokal, dokumen kolonial dapat digunakan untuk memperluas pemahaman mengenai lingkungan politik Sumanap pada abad XVIII. Dokumen-dokumen tersebut tidak selalu memberikan keterangan langsung mengenai pengalaman atau keputusan politik perempuan, tetapi dapat menunjukkan keberadaan institusi pemerintahan, hubungan antara elite lokal dengan VOC, serta bentuk komunikasi politik yang berlangsung pada masa itu. Penggunaan sumber kolonial dalam penelitian ini karena itu tidak diarahkan untuk mencari pembenaran atas setiap cerita lokal, melainkan untuk mengidentifikasi informasi yang dapat membantu menempatkan Tirtonegoro dalam konteks sejarah yang lebih luas.

Salah satu dokumen yang relevan adalah kontrak Sumanap bertanggal 30 April 1750 yang tercatat dalam "Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum", jilid 5, halaman 512–514, dengan nomor Contract CMXXVIII (928). Berdasarkan keterangan katalog yang telah ditelusuri, dokumen tersebut mencantumkan pihak lokal dengan nama atau gelar yang ditranskripsikan sebagai "Radeen Tommongong Tirtanagara". Keberadaan kontrak ini menunjukkan bahwa hubungan formal antara elite Sumanap dan VOC terdokumentasi pada periode yang berdekatan dengan masa yang menjadi perhatian penelitian. Meskipun demikian, nama tersebut tidak boleh langsung disamakan dengan Raden Ayu Tirtonegoro tanpa pemeriksaan identitas, gelar, dan konteks dokumennya. Dokumen ini lebih aman digunakan untuk menunjukkan konteks hubungan politik Sumanap dengan VOC daripada dijadikan bukti langsung mengenai tindakan Tirtonegoro ("Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum", jilid 5, Contract CMXXVIII [928], 30 April 1750, hlm. 512–514).

Sumber lain yang telah diidentifikasi adalah surat dari Sumanap bertanggal 19 Maret 1745 dengan judul arsip "Brief uit Sumanap door den Ingabeij Tirtanagara nevens de verdere mantries aldaar". Berdasarkan keterangan arsip yang tersedia bagi penulis, surat tersebut berkaitan dengan Ingabeij Tirtanagara dan para mantri di Sumanap. Informasi ini berpotensi membantu menjelaskan keberadaan pejabat lokal dan hubungan administratif-politik Sumanap sebelum periode yang menjadi fokus pembahasan. Namun, penggunaannya harus dibatasi pada keterangan yang telah dapat dipastikan dari identitas

dan deskripsi arsip. Isi surat tidak boleh disimpulkan secara terperinci apabila teksnya belum dibaca atau diterjemahkan secara memadai (Nationaal Archief, arsip 1.04.02, inv. Nr. 2656, 19 Maret 1745, hlm. 149).

Dua dokumen tersebut memperlihatkan pentingnya memperhatikan karakter sumber kolonial. Dokumen administratif biasanya dibuat untuk memenuhi kepentingan pencatatan, komunikasi, atau pengaturan hubungan politik. Karena itu, informasi yang muncul di dalamnya bergantung pada kebutuhan lembaga yang menghasilkan dokumen tersebut. Tidak semua orang yang memiliki peran dalam pemerintahan akan disebutkan, dan tidak semua aspek kekuasaan lokal menjadi perhatian pembuat arsip. Keterbatasan penyebutan perempuan dalam dokumen kolonial karenanya tidak dapat langsung dipahami sebagai bukti bahwa perempuan tidak terlibat dalam politik. Namun, kemungkinan tersebut juga tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan bahwa Tirtonegoro melakukan tindakan tertentu tanpa bukti yang mendukungnya.

Dalam penelitian ini, dokumen kolonial berfungsi terutama untuk memperlihatkan bahwa politik Sumanap berlangsung dalam lingkungan hubungan kelembagaan dan komunikasi dengan kekuatan eksternal. Konteks tersebut penting untuk memahami bahwa pemerintahan lokal tidak berdiri terpisah dari hubungan politik yang lebih luas. Meskipun demikian, hubungan formal dengan VOC tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana kekuasaan perempuan dijalankan di dalam pemerintahan Sumenep. Untuk menjawab persoalan itu, informasi dokumenter perlu dibaca bersama sumber lokal, silsilah, dan penelitian terdahulu mengenai perempuan serta struktur kekuasaan di Madura.

Dengan demikian, perbandingan sumber dalam penelitian ini bukan sekadar upaya mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang Tirtonegoro. Tujuannya adalah memahami jenis informasi yang dapat diberikan oleh setiap sumber dan batas kesimpulan yang dapat ditarik darinya. Historiografi lokal membantu menelusuri cara Tirtonegoro diingat, silsilah memberikan informasi mengenai hubungan genealogis, sedangkan dokumen kolonial menyediakan petunjuk tentang konteks kelembagaan dan hubungan politik Sumanap. Perbedaan tersebut justru menjadi dasar untuk menyusun pembacaan sejarah yang lebih kritis dan tidak menggantungkan kesimpulan pada satu jenis sumber.

Membaca Kembali Agensi Perempuan dalam Historiografi Sumenep

Pembacaan kembali terhadap Raden Ayu Tirtonegoro perlu dimulai dengan membedakan antara kedudukan politik, representasi historiografis, dan agensi. Kedudukan politik berkaitan dengan posisi seseorang dalam struktur pemerintahan, sedangkan representasi historiografis berhubungan dengan cara tokoh tersebut digambarkan dalam sumber dan karya sejarah. Adapun agensi merujuk pada kapasitas seseorang untuk bertindak dalam kondisi sosial dan politik tertentu. Ketiga aspek ini saling berkaitan, tetapi tidak dapat dianggap sama. Penyebutan seorang perempuan sebagai penguasa, misalnya, menunjukkan adanya pengakuan atas kedudukannya, tetapi belum cukup untuk menjelaskan seluruh tindakan dan ruang pengambilan keputusannya.

Pembedaan tersebut penting dalam membaca Tirtonegoro. Narasi lokal mengakui kedudukannya sebagai pemimpin perempuan Sumenep, sementara kisah yang diwariskan tentang dirinya banyak berhubungan dengan perkawinan, keturunan, dan konflik elite. Informasi tersebut dapat membantu menjelaskan bagaimana masyarakat mengingat tokoh tersebut, tetapi tidak selalu menyediakan keterangan terperinci mengenai pelaksanaan pemerintahan. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa Tirtonegoro memiliki bentuk kewenangan tertentu hanya berdasarkan statusnya sebagai penguasa atau berdasarkan kisah perkawinannya dengan Bindara Saod. Sebaliknya, penelitian menempatkan kedua hal tersebut sebagai petunjuk yang perlu dibaca dalam kaitannya dengan struktur politik dan cara historiografi lokal membangun penjelasan tentang legitimasi.

Dalam perspektif sejarah perempuan, perkawinan dan hubungan kekerabatan tidak harus ditempatkan sebagai unsur yang berlawanan dengan politik. Pada masyarakat kerajaan, hubungan keluarga dapat berkaitan dengan pembentukan aliansi, pewarisan kedudukan, dan pengakuan atas legitimasi penguasa. Namun, keberadaan hubungan tersebut juga tidak secara otomatis membuktikan bahwa seorang perempuan mempunyai atau tidak mempunyai kemandirian politik. Untuk memahami agensi perempuan, peneliti perlu menilai bukti mengenai kedudukan, tindakan, dan konteks yang tersedia, sekaligus mengakui bagian-bagian yang belum dapat dijelaskan oleh sumber.

Pendekatan ini sejalan dengan persoalan yang dibahas dalam penelitian mengenai perempuan Madura. Hidayati menunjukkan pentingnya mengkaji hubungan antara kepemimpinan perempuan dan struktur kekerabatan, sedangkan Warits serta Rahmawati dkk. Memperlihatkan bahwa ruang politik perempuan dapat dipengaruhi oleh nilai sosial,

relasi keluarga, dan struktur patriarkal. Meskipun konteks penelitian tersebut berbeda dari masa Tirtonegoro, kajian-kajian itu mengingatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik perlu dipahami melalui hubungan antara kapasitas individu dan struktur sosial yang membentuk ruang geraknya. Perspektif tersebut dapat digunakan untuk menyusun pertanyaan penelitian, tetapi tidak untuk menganggap bahwa pengalaman perempuan pada abad XVIII pasti sama dengan pengalaman perempuan pada masa modern (Hidayati, 2014, hlm. 203–206; Warits, 2012, hlm. 183–199; Rahmawati et al., 2021, hlm. 91–94).

Pembacaan historiografis juga menuntut perhatian terhadap kemungkinan bahwa suatu narasi lebih menonjolkan aspek tertentu daripada aspek lainnya. Ketika kisah perkawinan dan garis keturunan lebih banyak diuraikan dibandingkan proses pemerintahan, pembaca perlu bertanya apakah keterbatasan itu berasal dari tujuan penulisan, jenis sumber, tradisi penceritaan, atau keterbatasan informasi yang tersedia. Pertanyaan ini tidak harus dijawab dengan menyatakan bahwa penulis babad sengaja menghapus peran politik perempuan. Kesimpulan mengenai penghilangan yang disengaja memerlukan bukti yang lebih kuat. Namun, perbedaan antara aspek yang diceritakan dan aspek yang kurang dijelaskan tetap dapat menjadi bahan analisis untuk memahami cara perempuan direpresentasikan dalam historiografi lokal.

Oleh karena itu, Babad Sumenep digunakan dalam artikel ini untuk memperlihatkan salah satu bentuk narasi mengenai Tirtonegoro, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bagaimana kekuasaan perempuan bekerja. Penelitian terdahulu mengenai historiografi perempuan menjadi landasan untuk mengkritisi cara tokoh perempuan ditempatkan dalam narasi sejarah. Sementara itu, dokumen kolonial dan silsilah digunakan untuk memberikan konteks tambahan sesuai dengan jenis informasi yang tersedia. Cara kerja ini memungkinkan penelitian bergerak melampaui pembacaan yang hanya berpusat pada cerita tokoh tanpa mengabaikan pentingnya sumber lokal.

Dengan pendekatan tersebut, kontribusi artikel ini terletak pada upaya menghubungkan persoalan historiografi perempuan dengan kasus sejarah politik Sumenep. Tirtonegoro tidak hanya dibahas karena namanya tercatat sebagai pemimpin perempuan, tetapi juga karena representasinya membuka ruang untuk menilai bagaimana historiografi membangun ingatan tentang pelaku politik perempuan. Kajian ini memperlihatkan bahwa penulisan sejarah perempuan tidak cukup dilakukan dengan menambahkan nama perempuan ke dalam kronologi penguasa. Diperlukan pembacaan

kritis terhadap sumber, perbandingan antarjenis bukti, dan perhatian terhadap cara gender memengaruhi pemahaman mengenai kekuasaan. Dengan demikian, sejarah perempuan dapat menjadi bagian integral dari historiografi politik Madura, bukan sekadar pelengkap dari sejarah penguasa laki-laki.

KESIMPULAN

Pembacaan terhadap historiografi Sumenep menunjukkan bahwa Raden Ayu Tirtonegoro dikenang sebagai salah satu tokoh perempuan yang menempati posisi penting dalam sejarah politik Madura abad XVIII. Namun, representasinya dalam narasi sejarah masih banyak berkaitan dengan garis keturunan, perkawinan dengan Bindara Saod, dan konflik di lingkungan keraton. Kecenderungan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap kedudukan perempuan sebagai pemimpin belum selalu diikuti oleh penjelasan yang memadai mengenai agensi dan perannya dalam kehidupan politik. Melalui perspektif sejarah perempuan, Tirtonegoro perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai bagian dari silsilah penguasa, melainkan sebagai tokoh yang keberadaannya membuka ruang untuk mengkaji hubungan antara gender, legitimasi, dan penulisan sejarah lokal.

Perbandingan antara penelitian terdahulu, historiografi lokal, silsilah keraton, dan dokumen kolonial memperlihatkan pentingnya membaca setiap sumber berdasarkan karakter serta keterbatasannya. Penelitian mengenai perempuan dan politik di Madura membantu menjelaskan bahwa hubungan kekerabatan, konstruksi sosial, dan struktur kekuasaan merupakan aspek penting dalam memahami kepemimpinan perempuan. Sementara itu, Babad Sumenep memberikan gambaran mengenai cara Tirtonegoro diingat melalui narasi perkawinan, konflik elite, dan keberlanjutan pemerintahan. Dokumen kolonial mengenai Sumanap turut memberikan konteks tentang hubungan antara elite lokal dan VOC, meskipun belum dapat digunakan sebagai bukti langsung mengenai seluruh tindakan politik Tirtonegoro. Dengan demikian, pembacaan silang sumber memungkinkan sejarah Tirtonegoro dipahami secara lebih kritis tanpa menerima narasi lokal secara mutlak ataupun mengabaikannya.

Artikel ini menegaskan bahwa penulisan sejarah perempuan tidak cukup dilakukan dengan menambahkan tokoh perempuan ke dalam kronologi politik yang telah ada. Diperlukan kritik terhadap cara sumber membentuk representasi tokoh, perhatian terhadap informasi yang ditonjolkan maupun yang belum dijelaskan, serta perbandingan

dengan penelitian lain yang relevan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penggunaan kasus Raden Ayu Tirtonegoro untuk menunjukkan pentingnya perspektif historiografi perempuan dalam memperluas pemahaman tentang sejarah politik Madura. Meskipun keterbatasan sumber belum memungkinkan rekonstruksi terperinci atas seluruh bentuk agensi politiknya, kajian ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan melalui penelusuran arsip, naskah lokal, dan sumber sezaman lainnya. Dengan pendekatan tersebut, historiografi Sumenep dapat dikembangkan dengan memberikan perhatian yang lebih kritis terhadap posisi perempuan sebagai bagian dari sejarah politik lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, D. (1999). Metode penelitian sejarah. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Ahmad, Z. (2018). Babad modern Sumenep: Sebuah telaah historiografi. Araska.

Book Chapter / Bunga Rampai

Carey, P., & Houben, V. (1987). Spirited Srikandhis and sly Sumbadras: The social, political and economic role of women at the central Javanese court in the eighteenth and early nineteenth centuries. In E. Locher-Scholten & A. Niehof (Eds.), Indonesian women in focus (hlm. 12–42). Dordrecht: Foris Publications.

Artikel Jurnal (Cetak)

Amini, M. (2018). Gender bias in historiography of Indonesia and the writing of women's history. Jurnal Perempuan, 23(3), 157–160.

Hidayati, T. (2014). Kalebun bebini': Konstruksi budaya masyarakat Madura dalam melestarikan kekuasaan. KARSA: Journal of Social and Islamic Culture, 22(2), 203–204. https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/525

Pradadimara, D. (2019). Perempuan dan perspektif gender dalam penulisan sejarah Indonesia. Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya, 14(1), 69–76.

Rahmawati, A. D., Susanti, E., & Suyanto, B. (2021). The female klebun of Madura within the power constellation of the patriarchy: A post-colonial feminism perspective. Simulacra, 4(1), 87–99.

Rahayu, I. D. (2016). Pergeseran Kesultanan Sumenep ke tangan VOC tahun 1624–1705. AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah, 4(3). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/16430

Warits, A. (2012). Artikulasi politik perempuan Madura: Studi atas hambatan kultural dan tafsir agama pada partisipasi politik perempuan di Sumenep. KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, 19(2), 183–199.

Artikel Jurnal (Online)

Amini, M. (2018). Gender bias in historiography of Indonesia and the writing of women's history. Jurnal Perempuan, 23(3), 157–160. https://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/245

Sumber dari Situs Web

Pemerintah Kabupaten Sumenep. (2017). Raden Ayu Tirtonegoro dan Bindara Saod. Profil Selayang Pandang Kabupaten Sumenep. https://sumenepkab.go.id/profil/selayang-pandang

Karya Tidak Diterbitkan atau Arsip

Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. (t.t.). Contract CMXXVIII (928), Sumanap, 30 April 1750 (Jilid 5, hlm. 512–514).

Nationaal Archief. (1745, 19 Maret). Brief uit Sumanap door den Ingabeij Tirtanagara nevens de verdere mantries aldaar. Arsip 1.04.02, inventaris nomor 2656, hlm. 149.